

LAPORAN NOTULA

Rapat Koordinasi Working Group Demokrasi dengan K/L

Selasa, 25 Oktober 2022 – Pukul: 13.30 – 16.00

PENDAHULUAN

Open Government Indonesia (OGI) sedang melakukan penyusunan Rencana Aksi Nasional OGI (RAN OGI) VII tahun 2023 –2024. Pada proses penyusunannya OGI membuka kesempatan untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dapat mengusulkan rencana aksi mereka dalam lingkup keterbukaan pemerintah. Koalisi Pemantau Legislatif (KOPEL) dan Pekumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan usulan dalam ruang lingkup kepemiluan yang secara umum mendorong adanya keterbukaan data pemilu serta peningkatan upaya untuk menciptakan pemilu yang bebas disinformasi. KPU dan Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang dalam proses penyelenggaraan pemilu menjadi pihak yang disasar untuk mewujudkan usulan tersebut.

TUJUAN

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk:

1. Membahas usulan dari KOPEL dan Perludem
2. Mendiskusikan tanggapan dari KPU dan Bawaslu
3. Menyusun rencana tindak lanjut untuk dilaksanakan kedepannya

PEMBAHASAN

1. **Rike** selaku perwakilan dari Bawaslu menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
 - Rencana kerja sudah masuk ke tahap final. Namun, terdapat evaluasi bahwa harus lebih intensif koordinasi secara *top-down* untuk pelaksanaan kegiatan.
 - Pembelajaran dari pemilu 2019 dimana terjadi banyak misinformasi, Bawaslu sudah beberapa kali melakukan MoU dengan media sosial seperti FB, Twitter, dan juga Kominfo. Selain itu, juga terdapat pengaduan secara *online*. Dalam upaya pengawasan secara digital juga terdapat inisiasi Jarimu Awasi Pemilu yang merupakan gerakan pengawasan digital yang juga akan membuat komunitas digital.
 - Untuk SOP *takedown* postingan dari tiap media sosialnya sudah dilakukan kerjasama dengan Kominfo dan sudah menghasilkan MoU sehingga usulan dari KOPEL sudah menjadi bagian dari program Bawaslu.
 - Pada 18 Oktober lalu sudah diadakan koordinasi antara Kominfo & pemangku kepentingan lainnya (polisi dll) sudah bertemu bersama dengan Bawaslu, yang dipantau Menteri Kominfo. Salah satu output rapatnya adalah dilakukan Satgas khusus untuk pengawasan konten internet dalam menghadapi pemilihan umum 2024. *Leading sector*-nya Kominfo.
 - Bawaslu selalu terbuka akan masukan dari masyarakat untuk didalami dengan direktorat terkait untuk mendorong adanya koordinasi dan implementasi usulan dari masyarakat.
2. **Anwar** selaku perwakilan dari KOPEL menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
 - Surat Keputusan dari Bawaslu serta program yang akan dijalankan perlu ditransparansikan kepada publik serta diharapkan adanya keterlibatan aktif CSO untuk mendorong upaya efektivitas dan akuntabilitas pelayanan.
3. **Nudin** selaku perwakilan dari Bawaslu menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
 - CSO yang terakreditasi oleh Bawaslu akan dilibatkan dalam program Bawaslu yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang. KOPEL termasuk salah satu CSO yang terakreditasi dan bisa terlibat.
4. **Theo** selaku perwakilan dari Sekretariat *Open Government Indonesia* menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
 - Awalnya KOPEL tidak *aware* bahwa terdapat mekanisme pengawasan pemilu

melalui gerakan Jarimu Mengawas Pemilu. Jika ingin didorong melalui OGI harus ada penyesuaian dan pemetaan terkait apa yang harus dilakukan oleh masing-masing *stakeholder*.

- Sekretariat OGI akan memfasilitasi pertemuan berikutnya dan akan koordinasi dengan Bawaslu untuk *stakeholder* terkait yang tepat.
5. **Indra** selaku perwakilan dari KOPEL menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
 - *Timeline* dan teknis kerjasama antara CSO dengan Bawaslu harus didetailkan dengan baik. Menyarankan OGI untuk dapat mengundang Kominfo dalam pertemuan berikutnya.
 6. **Usep** selaku perwakilan dari Perludem menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
 - *Open data* gelombang 3 diperlukan bukan semata membuka akses keterbukaan tetapi juga inklusivitas, termasuk dengan potensi kolaborasi antar sektor.
 - Menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pemilu.
 7. **Dhika** selaku perwakilan dari Perludem menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
 - Data yang tersedia saat ini belum sesuai standar. Salah satunya adalah belum sesuai untuk didistribusi dan data belum dapat dibaca oleh mesin pembaca data. Selain itu, data tersebut juga harus inklusif untuk dapat diakses oleh semua orang tanpa adanya diskriminasi.
 - Perludem mengusulkan Tata Kelola Data Terbuka Pemilu dengan idealnya terdapat 16 kategori kunci data pemilu. Usulan ini didukung dengan sistem informasi yang sudah dimiliki oleh KPU. Sasaran keberhasilan dari usulan ini adalah tersedianya data pemilu dalam format data terbuka. Data yang sudah tersedia adalah data mengenai Dapil, Dacol, Parpol, Sidakam, Penghitungan dan Penetapan Suara, dan sebagainya.
 - Untuk pertemuan selanjutnya dapat dihosting oleh Perludem pada 16 atau 18 November. Dari KPU meminta penjelasan kembali informasi yang mau diminta.

KESIMPULAN

Usulan dari KOPEL dan Perludem berada di ruang lingkup penyelenggaraan pemilu yang mendorong adanya keterbukaan data dan mekanisme antisipasi menyebarnya misinformasi secara meluas kepada masyarakat. KPU dan Bawaslu selaku pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu memegang peranan penting untuk mendukung usulan dari KOPEL dan Perludem tersebut. Usulan ini memerlukan diskusi lebih lanjut untuk memperdetail informasi dan hal-hal teknis yang perlu untuk ditindaklanjuti antara CSO dan K/L terkait.

DOKUMENTASI

